

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian pada objek yang sedang diteliti. Berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	<i>Marijana Joksimovic dan Alseddig Ahmed (2017) The Internal Audit As Function To The Corporate Governance</i>	<i>Internal audit, audit committee, corporate governance, financial markets, collaboration</i>	<i>This study includes research using descriptive and verification analysis.</i>	<i>Good corporate governance practices of the company are essential to maintaining the sound and proper functioning of the</i>

				<i>financial sector. it is frequently argued that company failure might comprehend systemic risks and have a huge negative impact on depositors, other stakeholders, and the company as a whole.</i>
2	<i>Boris Tusek (2015) The Influence of The Audit Committe on The Internal Audit Operations in The System of Corporate Governance – Evidance of Croatia</i>	<i>Internal audit, audit committee, corporate governance.</i>	<i>Objective, descriptive and experimental quantitative research.</i>	<i>The objective of the research was to confirm that the delivery of the risk assessment and related internal audit plan directly to the audit committee has an influence on the improvement of the activities of internal auditing in acompany</i>
3	<i>Rahmawati Andika Rusli (2014) Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan Good Corporate</i>	<i>Audit internal, prinsip good corporate governance, kebijakan, efektifitas dan</i>	<i>Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.</i>	<i>Adanya audit internal akan mendorong tercapainya penerapan Good Corporate</i>

	<i>Governance</i> pada Kab.Luwu.	efisiensi kinerja.		<i>Governance</i> di lingkup inspektorat sehingga nanti mendorong tata kelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan baik, meskipun banyak faktor lain yang akan mendukung yang belum diteliti secara mendalam seperti karakteristik auditornya itu sendiri, etika editor tersebut dan faktor-faktor lainnya.
4	Farisa Lailatul Maharani, Saptarina Prita DS, Siti Maria W (2015) Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan pada Devisi Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jember Klinik	Pengendalian internal, manajemen risiko, prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif.	Penelitian ini menggambarkan pengendalian internal di dalam suatu perusahaan lebih menekankan pada manajemen <i>good corporate governance</i> . Dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan pengendalian keras,

				seperti pembagian tugas dan wewenang, tetapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak, seperti, integritas, nilai etis, dan komitmen pada perusahaan.
5	Indra Ramadhany, Novita Indraawati, dan Al Azhar L (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, dan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta yang ada di Pekanbaru)	Sistem pengendalian intern, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, <i>good corporate governance</i> , kecurangan akuntansi.	Merupakan penelitian <i>explanatory</i> , dan observasi.	Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi. Hal ini akan mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dimasa datang. Serta banyaknya pengaruh kecenderungan kecurangan akuntansi membuat

				perusahaan harus membuat beberapa strategi untuk mengantisipasi kecurangan akuntansi.
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang audit khususnya audit internal dan audit operasional serta tentang prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut, menjelaskan bahwa pentingnya sebuah tata kelola perusahaan yang baik dapat mewujudkan sebuah hasil yang maksimal dan memberikan efisiensi kinerja. Implementasi audit khususnya audit operasional dapat mengawasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga sebuah tujuan dari perusahaan akan tercapai. Perbedaan dari ke enam penelitian terdahulu ini adalah pada metode yang diteliti, objek penelitian serta waktu penelitian. Penelitian saat ini dilakukan di Rumah Sakit Airlangga Jombang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian *Governance*

Secara etimologis kata "*Governance*" berasal dari bahasa Perancis kuno "*Gouvernance*" yang berarti sebuah pengendalian atau kontrol dan dapat pula dikatakan suatu keadaan yang berada di dalam situasi terkendali atau dapat dikendalikan. Menurut Eddi (2010) *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengelola sebuah

perusahaan dengan cara meningkatkan nilai bagi pemegang saham serta mengakomodasi dari pihak yang juga berkepentingan bagi perusahaan.

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 menjelaskan *Governance* merupakan sebuah cara yang dapat dikembangkan serta menetapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektifitas, dan supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

The Australian securities Exchange Corporate Governance Council mendefinisikan *Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan pada satu titik tujuan dan dikelola. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana tujuan sebuah perusahaan ditetapkan dan dicapai, serta bagaimana sebuah risiko dipantau dan dinilai, dan bagaimana sebuah kinerja dapat terus dioptimalkan.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas, maka pengertian *Governance* adalah kumpulan dari peraturan yang mengatur dalam hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan mengenai hak dan kewajiban serta mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal.

2.2.2 Pengertian Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

2.2.2.1 Pengertian *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang

baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan menurut Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi atau keterbukaan informasi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan internal, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Agus Dwiyanto (2006:80) mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi, yaitu :

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
2. Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat *simple, straightforward and easy to apply* (sederhana, langsung, dan mudah diterapkan). Untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).

Transparasi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam intstitusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil di dalam institusi tersebut. Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparasi dikelompokan menjadi dua yaitu :

1. Transparasi Keuangan

Transparasi ini adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan di dalam sebuah intituti atau lembaga publik karena keuangan merupakan sektor penting yang paling riskan yang dapat diselewengkan. Transparasi keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari korupsi, menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi atau lembaga.

2. Transparasi Manajemen

Transparasi ini dilakukan untuk menjaga siklus kerja yang sehat di dalam sebuah institusi atau lembaga publik dengan tujuan mencegah terjadinya nepotisme, meminimalisir adanya tenaga kerja atau bidang yang tidak potensial di dalam institusi tersebut.

2.2.2.2 *Accountability* (Akuntabilitas)

Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara

berkala. Mardiasmo (2010) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, akuntabilitas vertikal yang bertanggung jawab kepada atasan langsung dan akuntabilitas horizontal yang berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara.

Sedangkan menurut Mahmudi (2008) akuntabilitas merupakan konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurut Mahmudi (2008) akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat

berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan secara optimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang akan disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

2.2.2.3 Responsibility (Pertanggung Jawaban)

Prinsip *Responsibility* mempunyai peluang penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat di mana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. (Valery G. Kumaat, 2010). Untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip *responsibility* atau pertanggung jawaban yang akan dibangun, dipahami, dan dilaksanakan. Uraian menurut

Valery G. Kumat (2010) mengikuti urutan butir-butir prinsip *responsibility* atau pertanggung jawaban yaitu:

1. Pimpinan, manager, dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku
2. Pimpinan. Manager dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan
3. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah dibangun
4. Manager dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standart operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan
5. Unit kerja organisasi perusahaan telah berupaya menghindari pengelolaan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholder
6. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup baik dengan terselenggaranya pekerjaan
7. Manager dan unit organisasi telah melakukan pertanggung jawaban atas hasil kerja secara teratur

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

2.2.2.4 Independency (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan independensi atau kemandirian adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing unit perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing unit perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Untuk meningkatkan prinsip *independency* dalam mengambil keputusan, perusahaan hendaknya menegaskan beberapa aturan, pedoman, dan praktek terutama pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-Undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

2.2.2.5 Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan menjadi faktor

pendorong untuk dapat memberikan pengakuan dan perlakuan yang adil di antara banyaknya benturan kepentingan dalam perusahaan.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran sebagai berikut :

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

2.2.3 Hospital Governance

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 36 disebutkan bahwa “Rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik yang baik”. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi dari sebuah penerapan sistem tata kelola rumah sakit dan klinik yang baik guna untuk melayani kebutuhan akan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan rumah sakit memiliki misi sosial, disamping pengelolaan sebuah rumah sakit juga tergantung pada kepemilikan rumah sakit. Rumah sakit memiliki misi yang tidak terlepas dari misi pelayanan sosial, namun tidak

dapat dipungkiri bahwa dalam pengelolaan sebuah rumah sakit terdapat konflik kepentingan dari berbagai pihak (Amartiwi:2012).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang dewan pengawas rumah sakit menyebutkan bahwa :

1. Pasal 1

- a. Peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi rumah sakit (*corporate bylaw*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- b. Dokumen pola tata kelola (*corporate governance*) adalah peraturan internal pada rumah sakit yang menetapkan PPK BLU/BLUD yang antara lain, menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.

2. Pasal 5

- a. Meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*).
- b. Berkoordinasi dengan kepala atau direktur rumah sakit dalam menyusun peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) atau

dokumen pola tata kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik.

3. Pasal 7

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas diatur oleh pemilik rumah sakit dan dituangkan dalam peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*).

4. Pasal 13

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) atau dokumen tata kelola (*corporate governance*) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

2.2.4 Pengertian Auditing

Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2012:4) audit adalah pemeriksaan dan kegiatan mengumpulkan serta mengevaluasi sebuah laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan akuntan publik. Audit terdiri dari penyelidikan catatan akuntansi serta bukti lainnya yang mendukung sebuah laporan keuangan. Audit dilakukan untuk menentukan dan melaporkan antara tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Konrath dalam Agoes yang dikutip oleh Mukminin (2010:9) mendefinisikan auditing adalah proses sistematis secara obyektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan ekonomi yang digunakan untuk meyakinkan keterkaitan antara asersi dengan

kriteria yang telah ditetapkan serta mengumumkan hasil temuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Alvin A, Arens, Mark S. Beasley dan Randal J.Elder (2011:4) auditing merupakan evaluasi dan akumulasi tentang informasi untuk menentukan serta melaporkan kesesuaian bukti dan informasi yang telah di tentukan. Audit dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan audit adalah proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran data yang dibuktikan oleh bukti-bukti yang ada serta audit digunakan untuk mengevaluasi bukti secara obyektif dan memberikan penilaian mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan. Audit harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta harus mampu menentukan jumlah bukti yang dibutuhkan yang akan berguna untuk mendukung kesimpulan yang akan di buat oleh auditor.

2.2.5 Audit Operasional

2.2.5.1 Pengertian Audit Operasional

Menurut Reider yang dikutip Tunggal (2012:16) mengatakan bahwa :
“Operational review procedures embrace the concept of conduting operations for economy, efficiency, and effectiveness”.

Sedangkan menurut Widjayanto yang dikutip oleh Divianto (2012:208) mendefinisikan audit operasional merupakan suatu tinjauan dan penelaan efisiensi dan efektivitas suatu prosedur-prosedur kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan disertai tanggung jawab untuk

mengungkapkan kepada manajemen mengenai berbagai masalah. Dimana komponen tersebut dapat memecahkan masalah dengan merekomendasikan tindakan yang diperlukan.

Menurut Bayangkara, IBK yang dikutip oleh Astari (2011:21) mengatakan bahwa audit operasional ditujukan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi, serta kegiatan dan program-program yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang akan diberikan dapat memperbaiki berbagai program dan aktivitas perusahaan. Audit operasional berorientasi pada masa depan, artinya berbagai penilaian hasil operasional diharapkan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Audit operasional adalah audit yang mempunyai ruang lingkup dalam seluruh aspek kegiatan manajemen serta mencakup pada evaluasi kelayakan keefektifan sebuah pengendalian agar mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, yang meliputi tenaga, biaya, dan waktu yang dipergunakan.

2.2.5.2 Jenis-Jenis Audit Operasional

Jenis audit operasional menurut tunggal (2012:22) terdiri dari tiga kategori utama yang digunakan dalam perusahaan, yaitu :

a. Audit Fungsional

Adalah kategori aktivitas dalam bisnis. Misalnya fungsi akuntansi dapat dibagi menjadi fungsi pengeluaran kas, dan fungsi

penggajian dapat dibagi menjadi fungsi penetapan karyawan, dan pencatatan waktu.

b. Audit Organisasional

Audit ini berfokus pada seluruh unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Dalam audit organisasional rencana organisasi dan metode organisasi untuk koordinasi merupakan metode yang diutamakan.

c. Penugasan Khusus

Dalam audit operasional penugasan muncul atas permintaan manajemen, dengan bermacam-macam jenis audit, misalnya untuk menentukan penyebab tidak efisiensinya Sistem Teknologi Informasi (TI).

2.2.5.3 Manfaat Audit Operasional

Menurut pendapat dari Divianto (2012:210) beberapa manfaat dari audit operasional antara lain :

1. Audit operasional mengidentifikasi tujuan, kebijaksanaan serta sasaran, dan prosedur organisasi yang sebelumnya tidak jelas
2. Identifikasi kriteria dapat digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan sebuah organisasi serta menilai kegiatan manajemen
3. Evaluasi independen dan obyektifitas dalam kegiatan tertentu

4. Sebuah pencapaian organisasi yang apakah sudah memenuhi prosedur, peraturan, dan sebuah kebijakan untuk tujuan yang telah ditetapkan
5. Penetapan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah pengendalian di manajemen
6. Tingkat penetapan kehandalan (*reability*) dan kemanfaatan (*usefulness*) dari laporan manajemen
7. Mengidentifikasi daerah permasalahan dan yang menjadi penyebab permasalahan
8. Mengidentifikasi berbagai kesempatan untuk dapat dimanfaatkan lebih serta digunakan untuk meningkatkan laba, mendorong pendapatan, dan mengurangi biaya serta hambatan dalam sebuah organisasi
9. Mengidentifikasi berbagai tindakan alternatif dalam setiap kegiatan operasional yang terjadi di perusahaan.

2.2.5.4 Karakteristik Audit Operasional

Tunggal (2008:9) mendefinisikan sebuah karakteristik di dalam audit operasional, yaitu :

1. Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif
2. Audit operasional mencakup dari semua aspek perusahaan, unit dan fungsi

3. Di dalam audit operasional yang di audit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya, salah satu fungsi, atau meliputi salah satu dari sub-klarifikasinya
4. Penelitian audit operasional dipusatkan pada prestasi, efektifitas, dan keefisienan dari perusahaan atau unit dan fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggungjawab dan tugasnya
5. Audit operasional dilakukan untuk menilai keefektifan didasarkan pada data dan bukti
6. Tujuan utama dari audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif tidaknya sebuah perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi. Diagnosis terhadap permasalahan serta sebab akibatnya, dan rekomendasi tentang langkah-langkah korektifnya merupakan tujuan tambahan dari audit operasional.

2.2.5.5 Tahap dalam Menjalankan Audit Operasional

Terdapat tiga fase dalam menjalankan audit operasional menurut Tunggal (2012:38-41) yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan di dalam audit operasional sama dengan perencanaan audit atas laporan keuangan historis. Seperti auditor laporan keuangan, audit operasional harus menentukan ruang lingkup penugasan dan mengkomunikasikan ke unit-unit organisasi.

Audit operasional tidak seperti audit laporan keuangan, di dalam audit operasional auditor diharuskan mempunyai lebih banyak waktu dengan pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai persetujuan atas syarat penugasan dan kriteria evaluasi

2. Akumulasi dan Evaluasi Bukti

Pengendalian internal, dokumentasi, penyidikan, observasi, prosedur operasi, dan prosedur analisis termasuk bagian terpenting di dalam audit operasional. Di dalam audit operasional sebuah konfirmasi pelaksanaan ulang dan perhitungan kembali tidak digunakan dibandingkan pada audit keuangan dan sebuah akurasi yang tidak relevan dengan kebanyakan audit operasional.

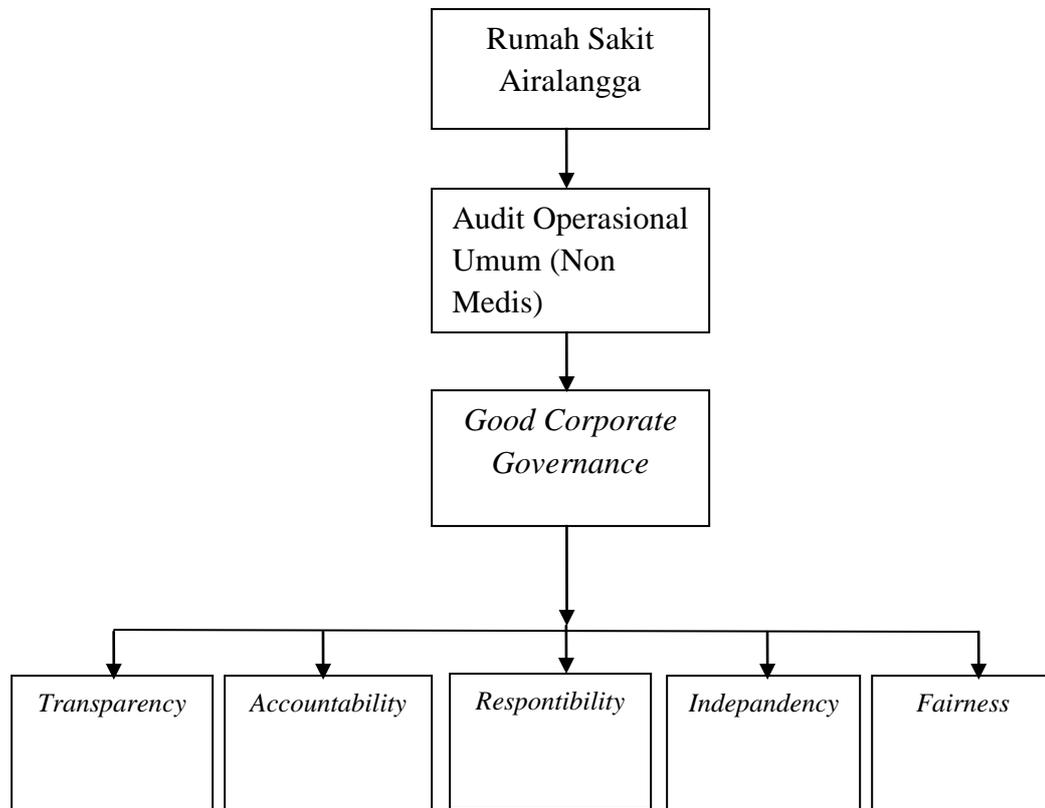
3. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Terdapat dua perbedaan utama antara laporan audit keuangan dan audit operasional yang mempengaruhi laporan audit operasional adalah :

- a. Dalam audit operasional, laporan biasanya hanya dikirimkan kepada manajemen, dengan tembusan kepada unit yang diaudit. Pengguna pada pihak ketiga tidak memerlukan susunan kata-kata baku untuk pembuatan laporan atas audit operasional.
- b. Banyaknya jenis audit operasional memerlukan laporan yang berbeda untuk mencakup ruang lingkup audit, temuan, dan rekomendasi. Tindakan tindak lanjut merupakan hal yang

umum di dalam audit operasional ketika auditor membuat sebuah rekomendasi untuk manajemen terdapat perubahan yang direkomendasikan dan apabila tidak, harus dijelaskan secara terinci alasannya.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan bahwa audit operasional digunakan untuk menilai apakah Rumah Sakit Airlangga Jombang sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik dan benar. Karena apabila rumah sakit sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* maka rumah sakit dikatakan sudah dapat mengelola, mengatasi, dan mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk itu diperlukan audit operasional untuk mengawasi proses penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Rumah Sakit Airlangga Jombang.